

## **BAB V**

### **ANALISA KONDISI E-GOVERNMENT**

### **KOTA DENPASAR**

#### **5.1. Analisa Resiko**

Pelaksanaan e-government yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar perlu dianalisis dengan menerapkan Analisa Resiko dan Analisa SWOT. Terdapat empat aspek yang dianalisa yaitu aspek suprastruktur e-government, infrastruktur jaringan, sistem informasi dan aplikasi, dan layanan e-government.

##### **Suprastruktur e-government**

Analisa resiko untuk suprastruktur e-government Kota Denpasar meliputi kebijakan, aturan pemerintah kota, kelembagaan dan sumber daya manusia. Resiko – resiko tersebut sebagai berikut.

- 1) Belum adanya kebijakan di level strategis dan taktis seperti Peraturan Daerah yang secara tegas mengatur pelaksanaan e-government terpadu di Kota Denpasar. Kebijakan ini sangat dibutuhkan sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan TIK di semua SKPD.
- 2) Belum terkoordinasinya kegiatan dan anggaran untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk seluruh SKPD, sehingga sulit melakukan perencanaan dan evaluasi atas efektifitas dan efisiensi anggaran TIK sebagaimana tujuan diselenggarakannya e-Government.
- 3) Belum ada SOP pengadaan, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian terkait dengan pengembangan e-Gov Pemkot Denpasar, hal ini sangat beresiko pada penyelenggaraan pengadaan dan pemanfaatan TIK untuk masing-masing SKPD tidak sinkron dan tidak standar yang memicu kerentanan in-efisiensi anggaran.
- 4) Belum dibentuk organisasi fungsional seperti CIO atau Dewan TIK daerah sebagaimana pengarah dari kemenkominfo pada Permen Kominfo Nomor 41 th 2007, organisasi ini dipimpin langsung oleh kepala daerah untuk fungsi yang menentukan kebijakan dan monev pengembangan dan pemanfaatan TIK, hal ini beresiko banyak usulan kebijakan dari pejabat eselon 3 tidak bisa menjangkau ke seluruh SKPD yang sebagian besar berada di eselon 2.

- 5) Dinas Kominfo belum mengontrol sepenuhnya atas pengembangan, pelaksanaan, dan pemanfaatan TIK Kota Denpasar serta kontrol anggaran secara terintegrasi, dikarenakan belum optimalnya kewenangan yang diberikan. Sehingga belum mampu menyediakan e-government yang efektif dan efisien dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan TIK di Pemkot Denpasar sangat penting sebagaimana diamanahkan dalam pengembangan e-government yang bertujuan untuk efisien dan efektifnya kinerja pemerintahan dengan pemanfaatan TIK.
- 6) Semangat membangun sistem informasi di semua SKPD sudah sedemikian maju pesatnya akan tetapi masih belum di akomodasi dan dikoordinir oleh Dinas Kominfo, perlu segera dibuat kebijakan dimana Dinas Kominfo mampu mengontrol semua aktifitas pengembangan dan pemanfaatan TIK di Pemkot Denpasar.
- 7) Kurangnya SDM Pemerintah Kota Denpasar yang berlatar belakang TIK di semua SKPD. Bahkan tidak seluruh SDM TIK tersebut yang termanfaatkan optimal untuk pekerjaan terkait TIK.
- 8) SDM yang dikelola oleh Dinas Kominfo masih jauh dari mencukupi untuk mengelola TIK di seluruh SKPD, sehingga banyak pekerjaan yang semestinya dikerjakan sendiri karena alasan keamanan informasi dengan terpaksa dilaksanakan oleh pihak ketiga selain itu SKPD perlu mengelola sendiri SDM TIKnya, padahal SKPD tidak mempunyai tupoksi pengelolaan TIK.
- 9) Pelatihan teknis masih belum memadai hal ini beresiko pada kurang optimalnya layanan infrastruktur TIK.
- 10) Belum disusun Business Continuity Plan pengelolaan infrastruktur TIK, sehingga jika suatu saat terjadi kegagalan layanan, maka Diskominfo kesulitan untuk melakukan suatu tindakan yang cepat, akurat dan efektif untuk menjamin keberlangsungan sistem.
- 11) Belum terkoordinasinya pengusulan kegiatan TIK SKPD, hal ini menyulitkan pengambil kebijakan untuk melakukan optimalisasi anggaran di sektor TIK.
- 12) Saat ini belum berjalan fungsi perencanaan dan kontrol atas penerapan e-Government di Pemerintah Kota Denpasar. Resiko yang dapat muncul antara lain: (a) implementasi TIK tidak dapat terukur langsung dalam menunjang misi pembangunan kota; (b) ketimpangan dalam implementasi TIK di lingkungan Pemkot; (c) ketidak seragaman standar teknologi, kebijakan dan kewajaran harga dalam pelaksanaan kegiatan TIK di SKPD; (d) redundansi kegiatan terkait TIK, yang sebenarnya dapat diintegrasikan; (e) tidak terintegrasinya kegiatan-kegiatan TIK; (f) kesulitan untuk

keberlangsungan aplikasi dalam jangka panjang di semua SKPD; dan (g) tidak diketahuinya secara jelas kondisi dari implementasi TIK di semua SKPD.

### **Infrastruktur Jaringan TIK**

- 1) Pengembangan Infrastruktur TIK sudah sangat mendesak untuk di tuntaskan. Sebagai kota modern dan pintu gerbang destinasi pariwisata mancanegara, sudah seharusnya Kota Denpasar memiliki sistem informasi dan infrastruktur TIK yang memadai, menyamai kota – kota pariwisata dunia.
- 2) Belum dilakukan pengelolaan bandwidth sehingga berapapun bandwidth tersedia akan selalu terasa kurang sehingga beberapa SKPD tetap ingin mengadakan sendiri kebutuhan bandwidthnya melalui jasa operator lain sesuai keinginan SKPD tersebut, hal ini beresiko pada optimalisasi sumber daya TIK dan kegiatan pemanfaatan TIK tidak bisa terkontrol dengan baik.
- 3) Semua SKPD sangat membutuhkan perangkat akses, server dan storage yang dikelola oleh SKPD Kominfo. Secara bertahap dibangun green data center yang sesuai dengan standar internasional. Pengelolaan green data center secara mandiri akan mereduksi kerawanan keamanan informasi.
- 4) Seluruh SKPD, Kecamatan, Puskesmas, dan RSUD sudah terhubung dengan jaringan Internet, namun kapasitasnya tidak mencukupi dan belum seluruhnya terintegrasi. Hanya sebagian kecil yang terlayani jaringan backbone Fiber Optic. Sisanya menggunakan wireless yang beresiko terjadinya gangguan alam (hujan dan petir) dan tingginya pemeliharaan.
- 5) Sistem pengamanan informasi/jaringan baik kabel maupun nirkabel sudah dilaksanakan namun belum diaudit. SKPD yang sudah terhubung jaringan internet terkendala dalam penyediaan LAN dan wifi yang memadai, hal ini terkait pula dengan kendala peran Dinas
- 6) Kominfo dalam penyediaan LAN dan Wifi SKPD termasuk kontrol setiap LAN SKPD.
- 7) Data dan informasi yang sedemikian besar belum dikelola dengan baik dengan belum tersedianya Disaster Recovery System dan Cloud Storage.

### **Sistem Informasi dan Aplikasi e-government**

- 1) Banyak aplikasi yang sudah dikembangkan oleh SKPD akan tetapi karena SKPD tidak memiliki sumberdaya yang memadai sehingga aplikasi tersebut menjadi kurang

- optimal pemanfaatannya karena tidak didukung oleh infrastruktur TIK yang memadai yang seharusnya dikelola oleh Dinas Kominfo.
- 2) Sistem informasi untuk pemerintahan di kecamatan dan kelurahan masih belum dibangun secara optimal demikian juga dengan infrastruktur yang ada masih belum optimal untuk kebutuhan e-government. Infrastruktur Internet disalahgunakan pemanfaatannya yaitu masih terbatas untuk berselancar di Internet yang sering tidak terkait langsung dengan kegiatan kantor. Sehingga pemanfaatan Internet yang kurang pas terkadang malah menjadi kontraproduktif.
  - 3) Resiko yang muncul dari sisi kondisi aplikasi TIK yang ada sekarang adalah sebagai berikut: (a) inefisiensi anggaran akibat kurang optimalnya operasional aplikasi; (b) penurunan kinerja akibat kurang optimalnya operasional aplikasi; (c) data masih terserak di setiap SKPD dan belum di inventarisir oleh Dinas Kominfo.
  - 4) Resiko yang muncul atas kondisi data yang ada sekarang adalah sebagai berikut: (a) kesulitan dalam pencarian data; (b) kesulitan dalam pelaporan data; (c) resiko dalam keamanan data; (d) resiko dalam integritas dan validitas data.

#### **Layanan e-government**

- 1) Belum jelasnya kewenangan Dinas Kominfo yang mengakibatkan setiap SKPD merencanakan dan mengembangkan infrastruktur TIK tanpa koordinasi dengan Diskominfo menimbulkan resiko layanan e-government terganggu jika sistem memerlukan data dan informasi dari SKPD lain.
- 2) Kapasitas dan kapabilitas sistem TIK wajib ditingkatkan seiring dengan kebutuhan publik dan perkembangan teknologi guna mengurangi loading time sistem yang bisa mengganggu layanan TIK ke publik dan internal Pemkot.
- 3) Help-desk terpadu dilengkapi dengan SOP dan tim troubleshoot untuk mengurangi resiko sia – sianya investasi TIK.

#### **5.2. Analisa SWOT**

Analisa SWOT populer digunakan untuk mendapatkan gambaran yang terukur tentang kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman terhadap pengembangan dan pembangunan e-government di Pemerintah Kota Denpasar. Analisa SWOT ini juga dapat menjadi dasar rekomendasi kepada para pemangku kepentingan agar kedepan e-government di Kota

Denpasar menjadi lebih selaras dan sesuai dengan visi misi Kota Denpasar. Berikut dibawah ini tabel 5.1 analisa SWOT e-government Kota Denpasar.

Tabel 5.1. Analisa SWOT E-Government Kota Denpasar

<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan Pemkot memiliki e-leadership</li> <li>2) Adanya regulasi daerah terkait kebijakan TIK dan e-Government</li> <li>3) Adanya Dinas Kominfo.</li> <li>4) Adanya kesadaran untuk merekrut SDM TIK.</li> <li>5) Banyaknya aplikasi yang dibangun SKPD.</li> <li>6) Infrastruktur jaringan Intranet sudah ada.</li> <li>7) Infrastruktur jaringan Internet sudah sampai ke seluruh SKPD dan Kecamatan.</li> <li>8) Memiliki sumber daya memadai untuk pembangunan e-govt dan smart city.</li> <li>9) Beberapa kali mendapatkan award dan nominasi untuk pembangunan e-govt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belum optimalnya sinergi antar SKPD untuk pembangunan e-govt.</li> <li>2) Belum cukupnya regulasi daerah untuk pembangunan e-govt.</li> <li>3) SDM TIK belum merata dan belum termanfaatkan dibidang TIK.</li> <li>4) Belum terintegrasinya pembangunan e-govt.</li> <li>5) Belum tersedianya prasarana untuk memastikan Bussiness Continuity Plan terlaksana.</li> <li>6) Belum adanya data center, data recovery center, cloud storage dan sistem pengamanan informasi yang memadai.</li> </ol>

<b>Peluang</b>	<b>Tantangan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan tuntutan kinerja aparat untuk layanan masyarakat yang baik</li> <li>2) Persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaan nasional.</li> <li>3) Peningkatan kesejahteraan aparat jika kinerjanya baik yang ditandai dengan indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan kota.</li> <li>4) Peningkatan peran e-govt dalam membangun Smart City.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kesenambungan pembangunan e-govt akibat dinamika politik di pucuk pimpinan.</li> <li>2) Menanamkan kesadaran kepada publik tentang tata cara memanfaatkan Internet dan layanan e-govt.</li> <li>3) Pengembangan TIK yang tidak selaras dengan visi, misi, dan tujuan e-government.</li> <li>4) Kondisi lingkungan untuk pembangunan infrastruktur jaringan.</li> <li>5) Tren dan perkembangan teknologi yang sangat cepat.</li> </ol>

### 5.3. Analisa Stratejik

Pada saat Rencana Induk Pengembangan TIK 2016 – 2020 ini disusun yaitu tahun 2015, Kota Denpasar akan mengadakan pesta politik daerah yaitu Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Sehingga visi dan misi yang akan dianalisa masih visi dan misi Kota Denpasar tahun 2011 – 2015. Namun ini bisa direvisi manakala visi dan misi Kota Denpasar yang baru telah ada. Untuk itu visi dan misi Diskominfo akan diusulkan yang mampu mengakomodir perkembangan daerah.

Visi Kota Denpasar (tahun 2010 - tahun 2015): **‘Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan’.**

Dengan misi Kota Denpasar dalam mewujudkan visinya adalah berikut ini.

- 1) Menumbuh kembangkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berdasarkan budaya Bali.

- 2) Memberdayakan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal melalui budaya kreatif.
- 3) Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) melalui penegakan supremasi hukum (law enforcement).
- 4) Meningkatkan Pelayanan publik menuju kesejahteraan masyarakat (welfare society).
- 5) Mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan.

Adapun Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar tahun 2010 – 2015 adalah:  
**“Terwujudnya Kota Denpasar sebagai Kota Informasi melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang berbasis budaya unggulan dalam keseimbangan menuju keharmonisan”.**

Adapun Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika guna mencapai efesiensi dan efektifitas kerja.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika.

Dari visi - misi Kota Denpasar dengan visi – misi Diskominfo Kota Denpasar dilakukan analisa kesesuaian seperti diperlihatkan oleh tabel 5.2.

Tabel 5.2. Analisa Kesesuaian antara Misi Diskominfo dengan Misi Kota Denpasar

	Misi Kota 1 Jati diri masyarakat berdasarkan budaya Bali	Misi Kota 2 Pemberdayaan masyarakat	Misi Kota 3 Tata Kelola Baik	Misi Kota 4 Pelayanan publik	Misi Kota 5 Ketahanan Ekonomi
Misi Diskominfo 1	√	√	√	√	√
Misi Diskominfo 2	√	√	√	√	√

Dari hasil analisa nampak bahwa Misi Diskominfo sangat generik dan sangat umum sehingga bisa diterapkan untuk setiap Misi Kota Denpasar. Visi dan Misi Diskominfo bisa dilaksanakan selamanya, sangat fleksibel, namun tidak secara spesifik melihat pada Visi

pembangunan kota yang sedang berjalan. Misi Diskominfo juga tidak menerjemahkan apa yang menjadi arahan pembangunan Kota seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2010 – 2015. Hal ini tidak salah, akan tetapi misi Diskominfo tidak tematik yang mengarahkan pada capaian tertentu dalam satu roadmap jangka panjang serta spesifik menjelaskan cara pencapaian dari Visi Diskominfo itu sendiri, yaitu berbasis budaya unggulan.

### **RPJMD Kota Denpasar Tahun 2010 – Tahun 2015, Rencana Induk Pengembangan E-Govt Pemkot Denpasar Tahun 2011 – 2015, dan Rencana Strategis Diskominfo Kota Denpasar Tahun 2011 – 2015**

Dari RPJMD Kota Denpasar Tahun 2010 – Tahun 2015 telah tertuang dengan lengkap dan detil tentang peranan TIK yang berarti pentingnya peranan Diskominfo dalam pembangunan kota. Peranan Diskominfo adalah menyediakan infrastruktur TIK yang handal dan mampu berkoordinasi baik dengan semua SKPD dan unit lainnya dalam mewujudkan program – program Kota Denpasar. Dari semua peranan tersebut ada yang Diskominfo sebagai ‘**Leading Sector**’, namun ada yang sebagai ‘**Supporting Team**’. Peranan penting dari Diskominfo tersirat dari program atau kegiatan berikut ini.

- 1) Peningkatan Pos dan Telekomunikasi.
- 2) Peningkatan penguasaan dan pengembangan aplikasi TIK.
- 3) TIK untuk mendukung mewujudkan Denpasar sebagai Kota Kreatif.
- 4) TIK sebagai alat pendukung untuk evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Walikota.
- 5) TIK untuk peningkatan kualitas dunia pendidikan.
- 6) TIK untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 7) TIK untuk mewujudkan e-government.
- 8) Penyediaan akses Internet sampai ke Rumah Tangga.
- 9) TIK untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan.
- 10) Akses TIK ke semua fasilitas pemerintah dan fasilitas umum seperti museum, perpustakaan daerah, dll.
- 11) TIK untuk diseminasi informasi dan kebijakan pemerintah kota, untuk promosi, dan untuk sosialisasi.

Namun semua yang tertuang di RPJMD tahun 2010 – 2015 tidak sepenuhnya terlihat pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) E-Govt Pemkot Denpasar Tahun 2011 – 2015, dan

Rencana Strategis Diskominfo Kota Denpasar Tahun 2011 – 2015. RIP Diskominfo terlalu generik dan umum, demikian juga dengan Renstra Diskominfo, sehingga tidak menyentuh tematik program – program Kota yang tertuang di RPJMD Kota. Tabel 5. 3 memperlihatkan matrik hubungan antara RPJMD dengan RIP egovt. dan Renstra Diskominfo.

Tabel 5.3. Analisa Kesesuaian antara RPJMD dengan RIP E-Govt. dan Renstra Dikominfo

<b>RPJMD Kota Th. 2010 - 2015</b>	<b>RIP Egovt. Diskominfo Th. 2011 - 2015</b>	<b>Renstra Diskominfo Th. 2011 - 2015</b>
1) Peningkatan Pos dan Telekomunikasi.	√	√
2) Peningkatan penguasaan dan pengembangan aplikasi TIK.	√	√
3) TIK untuk mendukung mewujudkan Denpasar sebagai Kota Kreatif.	Belum eksplisit tercantum.	Belum eksplisit tercantum.
4) TIK sebagai alat pendukung untuk evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Walikota.	√	Belum eksplisit tercantum.
5) TIK untuk peningkatan kualitas dunia pendidikan.	Belum eksplisit tercantum.	Belum eksplisit tercantum.
6) TIK untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	√	√
7) TIK untuk mewujudkan e-government.	√	√
8) Penyediaan akses Internet sampai ke Rumah Tangga.	Belum eksplisit tercantum.	Belum eksplisit tercantum.
9) TIK untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan.	Belum eksplisit tercantum.	Belum eksplisit tercantum.
10) Akses TIK ke semua fasilitas pemerintah dan fasilitas umum seperti museum, perpustakaan daerah, dll.	√	√
11) TIK untuk diseminasi informasi dan kebijakan pemerintah kota, untuk promosi, dan untuk sosialisasi.	√	√

Demikian juga dengan realisasi RIP e-Govt. Diskominfo, ada beberapa program yang belum sepenuhnya selesai implementasinya antara lain:

- 1) Penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) implementasi e-Govt.
- 2) Single Identity Number (SIN) sebagai kunci integrasi aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi.
- 3) Pembangunan pusat data (data centre), NOC (Network Operation Centre), basis data terpadu, web-service, Data Ware House (DWH), dan Sistem Informasi Eksekutif sebagai Dashboard Eksekutif.
- 4) Pengadaan sarana back-up, dan Disaster Recovery System.
- 5) Terbentuk sistem dan aplikasi pilwali online atau pilkada online.